



Irsyad¹
 Dafid Ginting²

PROSEDUR PENERBITAN PERSETUJUAN KEAGENAN KAPAL ASING (PKKA) MELALUI APLIKASI SIMLALA OLEH PT. SAMUDRA SHIPPING AGENCY DUMAI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana PT. Samudra Shipping Agency Dumai menerbitkan Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) melalui aplikasi SIMLALA untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Aplikasi SIMLALA (Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut) adalah platform yang digunakan untuk mengajukan permohonan pelayanan publik lalu lintas dan angkutan laut secara online, dan aplikasi ini memudahkan pemantauan proses permohonan layanan guna memastikan pelayanan yang transparan dan sesuai standar. Proses penerbitan PKKA melibatkan beberapa langkah yaitu, menyiapkan data dan dokumen, mengisi data dan dokumen, melakukan verifikasi, membayar invoice dan akhirnya PKKA terbit. Terdapat beberapa kendala, yakni faktor internal yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan jaringan internet, selain itu dari segi faktor eksternal, aplikasi SIMLALA sering mengalami gangguan pada sistem dan perubahan jadwal kapal. Adapun upaya untuk mengatasi kendala tersebut meliputi faktor internal menyiapkan cadangan internet dan validasi data atau dokumen, sedangkan pada faktor eksternal sering diadakan maintenance aplikasi SIMLALA dan monitoring jadwal kedatangan kapal. Data dalam penulisan ini meliputi data primer, yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak Perusahaan serta data sekunder, yang di kumpulkan dari buku-buku di Perpustakaan dan sumber bacaan lainnya yang relevan dengan topik yang di bahas.

Kata kunci: Prosedur, Penerbitan, PKKA, SIMLALA

Abstract

This study This research aims to understand how PT. Samudra Shipping Agency Dumai issues a Foreign Ship Agency Approval (PKKA) through the SIMLALA application to support the company's operational activities. The SIMLALA application (Sea Transport Traffic Management Information System) is a platform used to submit requests for public traffic and sea transport services online, and this application makes it easier to monitor the service request process to ensure transparent and standardized services. The PKKA issuance process involves several steps, namely, preparing data and documents, filling in data and documents, verifying, paying invoices and finally the PKKA is issued. There are several obstacles, namely internal factors related to Human Resources (HR) and internet networks, apart from external factors, the SIMLALA application often experiences system disruptions and changes in ship schedules. Efforts to overcome these obstacles include internal factors, preparing internet backups and validating data or documents, while external factors often maintain SIMLALA applications and monitor ship arrival schedules. The data in this writing includes primary data, which was obtained through direct observation and interviews with the Company as well as secondary data, which was collected from books in the library and other reading sources that are relevant to the topic being discussed.

Keywords: Procedure, Publishing, PKKA, SIMLALA

PENDAHULUAN

Menurut Sudrajat dkk (2024 : 289) aplikasi online berbasis web yaitu Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA), digunakan untuk mengajukan permohonan pelayanan publik lalu lintas dan angkutan laut secara online, dan memudahkan

^{1,2)} Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan
 email: irsyadrasyid14@gmail.com¹, dafidginting12@gmail.com²

pemantauan proses permohonan layanan tersebut untuk dapat mewujudkan layanan secara transparan dan standar. Fungsi dari aplikasi SIMLALA ini untuk mendukung kelancaran proses permohonan pelayanan kapal asing yang akan memasuki pelabuhan yang ada di wilayah Indonesia. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/41/10/DJPL-16 Aplikasi online berbasis web yaitu Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA), digunakan untuk mengajukan permohonan pelayanan publik lalu lintas dan angkutan laut secara online, dan memudahkan pemantauan proses permohonan layanan tersebut untuk dapat mewujudkan layanan secara transparan. Menurut Erika Situmorang dkk (2024 : 290) Persetujuan Keagenan kapal Asing (PKKA) merupakan salah satu syarat agar dapat berlabuh di pelabuhan Indonesia yang dikeluarkan oleh agen kapal yang bertanggung jawab atas pengurusan kapal dan proses pembuatannya dilakukan secara online melalui Sistem Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA). Adapun permasalahan yang terjadi pada PT. Samudra Shipping Agency Dumai dalam pengurusan Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) adalah kesalahan penginputan data atau dokumen, sehingga mengakibatkan pengulangan dalam penginputan data atau dokumen di aplikasi SIMLALA dan dapat menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan dokumen PKKA.

PT. Samudra Shipping Agency merupakan perusahaan pelayaran yang salah satunya memiliki pelayanan jasa dalam pengurusan dokumen PKKA tersebut. Perusahaan melakukan pelayanan jasa tersebut dengan menggunakan aplikasi guna mempermudah dan memperlancar pengurusan dokumen PKKA. PKKA menjelaskan bahwa persetujuan bagi penyelenggara yang ikut dalam kegiatan angkutan laut dalam suatu perusahaan pelayaran nasional yang digunakan untuk mengageni kapal asing.. PKKA ini memiliki batas waktu hanya 14 hari dari pembuatannya, dan apabila batas yang telah ditentukan telah habis dan kapal belum tiba maka pihak dari agen harus mengajukan kembali PKKA. Adapun tujuan aplikasi SIMLALA untuk mempermudah keagenan untuk mendapatkan izin berupa Pesetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA).

Setiap kapal asing yang sedang melaksanakan kegiatan di wilayah pelabuhan Indonesia, harus memiliki Persetujuan Keagenan Kapal Asing (selanjutnya dapat disebut sebagai PKKA) yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran untuk keagenan kapal. Perihal persetujuan keagenan kapal asing diatur dalam pasal 5 ayat 2 KM 33 tahun 2001 yang berbunyi “Penggunaan kapal asing untuk angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), sebelum dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja wajib dilaporkan dan diterima Direktur Jenderal menurut contoh pada lampiran I Keputusan ini, untuk selanjutnya dapat diberikan kelonggaran syarat bendera (dispensasi)”. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat agar kapal dapat masuk ke wilayah perairan Indonesia, maka kapal wajib menggunakan dokumen PKKA. Kapal asing yang tidak memenuhi syarat tidak diperkenankan untuk dapat beroperasi dan tidak diberi pelayanan pelabuhan di wilayah Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui permasalahan terkait aplikasi SIMLALA dalam proses penerbitan dokumen PKKA di PT. Samudra Shipping Agency dengan mengangkat topik tersebut dalam makalah yang berjudul “Prosedur Penerbitan Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) Melalui Aplikasi SIMLALA oleh PT. Samudra Shipping Agency Dumai.”

METODE

1. Metode Lapangan (Field Research)

Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek. Penulisan mempelajari dan mencari penyesuaian antara keterangan yang diperoleh dengan keadaan lapangan yang sebenarnya

2. Metode Perpustakaan (Library Research)

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca buku - buku di perpustakaan Poltek AMI Medan dan sumber bacaan lainnya yang berkenaan dengan pembahasan pada makalah penulis. Metode ini membantu penulis di dalam memahami istilah - istilah serta pengertian yang tidak dapat dijelaskan pada riset lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktifitas Perusahaan Pada Prosedur Penerbitan Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) Melalui Aplikasi SIMLALA oleh PT. Samudra Shipping Agency Dumai

Aplikasi SIMLALA merupakan Aplikasi yang di gunakan pada pengurusan PKKA pada Perusahaan pelayaran yang bertindak sebagai Agen/General Agen. Surat/dokumen PKKA yang di dalamnya berisikan Nama dari sebuah Kapal, Bendera Kapal, Ukuran Kapal, Owner/Principal (yang memiliki kapal atau yang menyewa kapal), Nomor dan Tanggal siupal dari perusahaan, Status (status trayek kapal), Pelabuhan Asal dan Tujuan (pelabuhan yang sebelumnya dan yang akan disinggahi untuk melakukan kegiatan kapal), Port agent / Sub agent atau perusahaan yang telah ditunjuk untuk mengageni, ETA (Estimated of arrival) atau ETD (Estimted of departure), Kegiatan B / M (bongkar atau muat muatan), Crew List atau nama crew yang berada dikapal beserta jabatan dan kebangsaannya, Keterangan (bahwa apakah ada pelarangan atas cargo yang dimuat dalam kapal tersebut).

PKKA ini berguna pada saat pihak agen bertugas mengageni kapal asing yang berada di Pelabuhan Indonesia maupun agen yang telah ditunjuk oleh pemilik kapal untuk mengageni kapal asing tersebut, estimasi waktu dalam proses pembuatan PKKA tersebut kurang lebih berkisar 1- 2 hari pada saat hari dan waktu kerja, maka sebaiknya dilakukan pengajuan pembuatan PKKA oleh agen tersebut sekitar 5 hari sebelum kapal tiba di Pelabuhan muat maupun pelabuhan bongkar untuk menghindari resiko terjadinya gangguan pada sistem dan keterlambatan pada pencetakan PKKA. PKKA dikhususkan untuk kapal luar negeri yang akan bersandar di Indonesia, masa berlaku 14 hari dari masa dibuatnya. Di dalam PKKA terdapat jumlah kru beserta asal kebangsaan dari masing-masing kru yang ada diatas kapal dan terdapat pelabuhan asal maupun pelabuhan yang akan dituju. PKKA berfungsi untuk penyandaran kapal serta bongkar muat di pelabuhan selanjutnya, dan dibuat oleh agen kapal yang mengurus kapal tersebut dan dibuat secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA) Kemenhub. Berdasarkan dari perusahaan tempat penulis melakukan praktek darat terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi agar dapat melakukan pengajuan PKKA dengan lancar yaitu ketepatan waktu, hambatan pengurusan yang berasal dari sarana prasarana, kendala dari pengurusan SDM dan kendala dari eksternal.

Dalam mengakses aplikasi SIMLALA tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengguna yaitu dapat login terlebih dahulu ke website <https://simlala.dephub.go.id/simlala> dan memiliki akun yang sudah terdaftar agar dapat mengakses ke tahap selanjutnya yaitu dengan memasukkan Username, password dan captcha yang telah tercantum pada aplikasi tersebut kemudian dapat mengklik "login" dan akan masuk ke dalam beranda pada tampilan utama menu untuk dapat dilanjutkan proses pengajuan permohonan dokumen PKKA.

Dokumen-Dokumen Pendukung Penerbitan Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) Melalui Aplikasi SIMLALA

Sebelum mengajukan permohonan PKKA, harus disiapkan sertifikat dan dokumen yang diperlukan dalam sistem SIMLALA. Dokumen PKKA agar dapat terbit dan dapat digunakan untuk menunjang kegiatan operasional kapal maka, harus memenuhi syarat untuk memenuhi hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut/Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPAL/SIUPKK)
2. Surat permohonan PKKA dari perusahaan agent yang melakukan pengajuan.
3. Fotokopi/scan Agency Agreement atau Letter Of Appointment dari Ship Owner/Owner Representative (surat penunjukan agen dari owner)
4. Fotokopi/scan COC (Certificate of Classification)
5. Fotokopi/scan Certificate of Registry
6. Fotokopi/scan Sertifikat International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP)
7. Crew List (dengan update no pelaut)
8. Fotokopi/scan Certificate of International Ship Security Certificate (ISSC)
9. Fotokopi/scan Certificate of Tonnage
10. Shipping Instruction dari Shipper (pemilik barang di pelabuhan muat)
11. Fotokopi/scan Ship Security Officer (SSO)
12. Fotokopi/scan Company Security Officer (CSO).

Surat/dokumen PKKA yang di dalamnya berisikan Nama dari sebuah Kapal, Bendera Kapal, Ukuran Kapal, Owner/Principal (yang memiliki kapal atau yang menyewa kapal),

Nomor dan Tanggal siupal dari perusahaan, Status (status trayek kapal), Pelabuhan Asal dan Tujuan (pelabuhan yang sebelumnya dan yang akan disinggahi untuk melakukan kegiatan kapal), Port agent / Sub agent atau perusahaan yang telah ditunjuk untuk mengageni, ETA (Estimated of arrival) atau ETD (Estimted of departure), Kegiatan B / M (bongkar atau muat muatan), Crew List atau nama kru yang berada dikapal beserta jabatan dan kebangsaannya, Keterangan (bahwa apakah ada pelarangan atas cargo yang dimuat dalam kapal tersebut). Contoh dari dokumen PKKA tersebut dapat dilihat pada lampiran.

Langkah-Langkah Mengoperasikan Sistem Permohonan PKKA di Aplikasi SIMLALA

1. Pertama, masuklah ke <https://simlala.dephub.go.id/simlala/>
2. Login ke sistem Simlala dengan memasukkan ID, password, dan captcha. Setelah itu, klik “Login”
3. klik “Permohonan” dan arahkan kursor ke PKKA. Kemudian pilih “Pendaftaran PKKA Tramper” (untuk kapal dengan dengan tujuan, rute, dan jadwal yang tidak tetap (tramper).
4. Kemudian isilah, informasi seperti yang di minta sebagai berikut
 - a. No permohonan PKKA
 - b. Nama kapal
 - c. Voyage
 - d. Nama owner
 - e. Imo number
 - f. Bendera
 - g. Principal
 - h. Ukuran (DWT/GT/HP)
 - i. Port agent (local agent yang di tunjuk oleh general agent)
 - j. Sub agent (local agent yang di tunjuk oleh general agent)
5. Masukkan keterangan kru kapal, yang terbagi menjadi jumlah dan kebangsaan kru.
6. Masukkan info Pelabuhan asal, Singgah, dan Tujuan. Keterangan selengkapnya disimak dalam poin a, b, dan c sebagai berikut:
 - a. Pelabuhan asal
Setiap pembuatan PKKA, Pelabuhan Asal Kapal (Last Port) wajib dimasukkan ke dalam sistem. Pengisian pelabuhan asal bisa dilakukan dengan meng-klik tanda “tambah” yang selanjutnya akan memunculkan pilihan pencarian “Nama Pelabuhan Asal”. Setelah Pelabuhan yang dicari ditemukan, klik “Simpan”
 - b. Pelabuhan Singgah
Klik “Tambah” di bagian “Daftar Pelabuhan Singgah” untuk memunculkan pencarian nama pelabuhan yang dapat kita tentukan sesuai shipment kapal yang akan datang.
 - c. Pelabuhan Tujuan
Klik tanda “Tambah”, lalu “Search” tujuan pelabuhan sesuai informasi yang diterima oleh pemilik kapal. Setelah pelabuhan ditemukan, klik nama pelabuhan dan klik “Simpan”.
7. Setelah selesai, jangan lupa untuk mengisi tanggal perkiraan kedatangan kapal (ETA) dan perkiraan keberangkatan kapal (ETD), mates. Selanjutnya, klik tulisan “Tambah” untuk mengisi tipe aktivitas kapal, baik itu Loading (muat) atau Discharge (bongkar), dan isi detail muatan
8. kapal dengan cara meng-klik tanda “Search” dan memilih “Jenis Muatan”, “Quantity”, serta “Satuan”. Setelah itu, klik “Simpan”.
 - a. Dokumen wajib
 1. Fotokopi SIUPAL/SIUPKK
 2. Surat Permohonan PKKA
 3. Fotokopi Agency Agreement atau Letter Of Appointment
 4. Fotokopi Certificate of Classification
 5. Fotokopi Certificate of Registry
 - b. Dokumen Tambahan
 6. Fotokopi Certificate of IOPP (Kapal tanker di atas 25 tahun yang mengangkut oil)
 7. Crew List
 8. Fotokopi Certificate of CSO, ISSC, SSO
 9. Fotokopi Certificate of Tonnage

10. Fotokopi Certificate of Fitness (Untuk kapal aspal tidak perlu dilampirkan di sistem)

11. Shipping Instruction

Setelah selesai, sekali lagi lakukan pengecekan untuk memastikan seluruh dokumen dan sertifikat kapal telah memenuhi persyaratan dan diinput dengan benar. Bila sudah yakin dengan semua dokumen dan sertifikat yang diinput, klik tanda “Checklist” untuk persetujuan dan pilih “Simpan”

SIMPULAN

Prosedur Penerbitan Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) pada umumnya berjalan dengan baik dan lancar, akan tetapi terkadang terjadi hambatan. Hambatan itu terdiri dari faktor internal adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan jaringan internet pada PT. Samudra Shipping Agency Dumai dan juga faktor eksternal adalah aplikasi SIMLALA mengalami gangguan (server error) dan perubahan jadwal kedatangan kapal serta terlambatnya Shipowner/Charterer dalam menginformasikan next port kapal dan berapa jumlah muatan yang akan di muat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rusdiana, Qiqi Yuliati Zaqiah : Manajemen Perkantoran Modern. Bandung : Penerbit Insan Komunika, 2014.
- Amrullah, Amalia : Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan 9, no 2, 2020 : 171
- Buku Pedoman Praktek Darat dan Penulisan Makalah POLTEK AMI, Medan: 2023
- Erika, Dirhamsyah, dan Fadiyah : Proses Penerbitan Dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) pada PT. Pelayaran Dwi Putra Laksana Batam. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 2, no 2, 2024 : 290
- Ginting, D. (2019). Pengaruh Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Dan Motivasi Kerja Terhadap Efektivitas Organisasi Pada Akademi Maritim Indonesia Kota Medan. Journal of Maritime and Education (JME), 1(2), 55-59.
- Ginting, D., & Siska, E. (2021). Prosedur Penerbitan Delivery Order Dalam Pengambilan Container Pada Pt. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan Cabang Medan. Journal of Maritime and Education (JME), 3(1), 155-160.
- Girsang, J. W., & Ginting, D. (2024). Prosedur Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) di atas kapal MT. Garuda Asia pada PT. Pelayaran Multi Jaya Samudera Belawan. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 11692-11700.
- Herman Budi Sasono, Soegiharto, Rosadiro Cahyono : Manajemen Kapal Niaga, Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2014.
- I Kadek Laju, Janny Adriani Dajari, : Prosedur Darurat, Semarang : Penerbit Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2020.
- Menhub pasal 5 ayat 2 KM 2001 perihal Persetujuan Keagenan kapal Asing.
- Muhammad Adiguna Bimasakti, Muhammad Nur Halim Perdana Kusuma : Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik : Penerbit Kencana, 2020.
- Muhammad Suryawinta : Buku Ajar Pengembangan Aplikasi Berbasis Web, Sidoarjo : UMSIDA PRESS, 2019.
- Muhammad Teguh Pangestu : Pokok-Pokok Hukum Kontrak, Makassar : Social Politic Jenius (SIGn), 2019.
- Peraturan Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/41/10/DJPL-16 Tentang Aplikasi berbasis web (SIMLALA).
- Simajuntak, D. J., & Ginting, D. (2024). Upaya Meningkatkan Pelayanan Keagenan Pada PT. Samudra Shipping Agency Dumai. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(2), 1103-1113.
- Simanjuntak, R., & Ginting, D. (2024). Penerbitan Dokumen Manifest Muatan Palm Oil In Bulk Pada PT. Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(2), 8566-8575.
- Sudrajat, Hertina, dan Dyahrini. Sistem Logistik di Indonesia : Scientific Journal Of Reflection 7 no 2, 2024 : 289

Suparwan, Sari dan Badarusman : Kinerja Keagenan dan Clearnce Kapal Livestock Perusahaan Pelayaran Indonesia. Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik 7 no 2, 2018 : 234
Suprihanto, Jhon. Manajemen. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2014.
Undang-Undang Pelayaran Nomor : 17 Tahun 2008 Ayat 3 Tentang Keagenan Kapal Asing.